



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor. 26 B PASURUAN 67126 Jawa Timur  
Telepon/ Fax. (0343) 422754 Email: dpmpstp@pasuruankota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN**

**NOMOR 188/1330/423.107/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
-

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
  25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
  26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
-

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan atau RKAP kegiatan tahun berkenaan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pasuruan  
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor. 26 B PASURUAN 67126 Jawa Timur  
Telepon/ Fax. (0343) 422754 Email: dpmpstsp@pasuruankota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN**

**NOMOR 188/ 1331 /423.107/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
-

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
1. Menghimpun, memilah, dan menganalisa bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022;
  2. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan agenda dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022;
-

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Menyusun laporan pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022;
5. Menyusun rancangan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022;
6. Menetapkan rancangan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pasuruan  
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 188/ ~~1331~~ /423.107/2022  
TANGGAL : 1 Agustus 2022

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN TAHUN 2022**

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
2	KETUA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
3	SEKRETARIS	Perencana Ahli Muda
4	ANGGOTA	a. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b. Bidang Penanaman Modal
		- Analis Kebijakan Ahli Madya
		- Analis Kebijakan Ahli Muda
		c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		- Analis Kebijakan Ahli Madya
		- Analis Kebijakan Ahli Muda
		d. Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan
		- Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya
		- Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



**Pemerintah Kota Pasuruan**

# **P-RENJA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

# **2022**

**dpm&ptsp**  
KOTA PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 26 B  
Pasuruan  
0343-427754

## PENDAHULUAN

BAB  
I**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2022.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tribulan II, yang sekiranya dapat menjadi penyempurnaan kinerja DPMPTSP untuk peningkatan kinerja realisasi investasi Sistem Pelayanan Perizinan.

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Pasuruan disusun dengan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

❖ Pembentukan tim penyusun

Anggota tim penyusun Renja adalah pejabat dan staf yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja yang merupakan perwakilan

dari setiap bidang yang ada yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan serta memahami substansi tugas dan fungsi PD

❖ Orientasi mengenai Renja

Orientasi diberikan untuk menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan terkait, serta untuk mengetahui aspek–aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

❖ Penyusunan agenda kerja

Agenda kerja disusun dengan memerinci setiap tahapan untuk perubahan kegiatan dalam kegiatan penyusunan dokumen Renja dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Renja.

❖ Pengumpulan data dan informasi

Setiap perubahan usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja yang sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan untuk mengakomodasi kepentingan investor/ pengusaha guna memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi.

Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dimanifestasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Terkait dengan itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpatokan pada dokumen perencanaan tingkat kota dan Renstra. Perubahan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan rancangan awal Perubahan RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan Perubahan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan Perubahan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan

dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Implementasi rencana pembangunan tahun 2022 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 050/343/SE/423.204/2022 pada Tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022, Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Surat Edaran Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.

8. Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Begeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2022.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja DPMPSTSP Tahun 2022 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja PD dan Rencana Kerja anggaran perubahan PD. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPSTSP adalah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Pelayanan Publik serta mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat

terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal, selain itu dapat terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan kode rekening dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dimanifestasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala PD

Daftar Isi

##### **Bab I      Pendahuluan**

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II      Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Tribulan II Tahun 2022**

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD **sampai dengan tribulan II Tahun 2022** dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas  
    Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal P-RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022
- 3.2 Pemetaan Sasaran terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
- 3.3 Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional

**Bab IV Penutup**

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIBULAN II TAHUN 2022

### BAB II

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Tribulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra DPMPTSP meliputi kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tribulan II Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022, selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dimana pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) program rutin dan 5 (Lima) program prioritas, 13 Kegiatan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 7.645.304.889,- dengan serapan anggaran sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 (Tribulan 2) adalah sebesar Rp. 2.174.622.697,00 atau sebesar 28,44 persen.

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap target RPJMD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 88% (Tinggi) dengan realisasi keuangan 28.44% (Rendah). Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Koordinasi antar bidang terkadang masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan penyusunan laporan tidak tepat waktu
2. Kecepatan kuota jaringan internet yang menjadi penghambat dalam proses penghitungan realisasi investasi
3. Masih ada perusahaan yang belum tahu dan menerapkan NIB

4. Adanya Perubahan Anggaran (Pergeseran dan PAK) sehingga menyebabkan pencairan realisasi anggaran terhambat.

Keberhasilan capaian ini dikarenakan beberapa faktor antara lain meningkatnya motivasi kinerja aparatur DPMPTSP untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai target, Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD terkait maupun dengan instansi terkait pada sektor penanaman modal dan pelayanan perijinan, Meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha di Kota Pasuruan tentang ketentuan dan manfaat pelayanan perijinan, Tertibnya masyarakat dalam proses pembayaran retribusi, Fasilitas aplikasi yang memadai sehingga para pelaku usaha lebih mudah dalam mengakses, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rincian capaian program prioritas sebagai berikut :

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pertama Dinas yaitu meningkatkan Nilai Investasi. Pengukuran kinerja dengan indikator program jumlah nilai realisasi investasi, Realisasi investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp. 252.987.816.400,00 dari target sebesar 245.356.920.000,00 dengan capaian sebesar 103.11 persen. Nilai realisasi investasi Kota Pasuruan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 nilai investasi targetnya sebesar 240.546.000.000,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar 245.952.766.000,00 dengan capaian sebesar 102,25 persen sehingga pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,86 persen.

Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2021 terdiri dari 18 sektor, sektor tertinggi berasal dari bidang perumahan dan ruko yaitu sebesar Rp. 127.423.672.700,00 dan sektor terendah berasal dari bidang usaha peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidaya sarang burung) sebesar Rp.31.000.000,00.

Realisasi investasi sampai dengan Bulan Mei Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 115,100,424,200,00 dari target sebesar 250.264.058.400,00 dengan capaian sebesar 46 persen.

Adapun berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim investasi antara lain kegiatan Pameran promosi potensi dan peluang investasi, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi dan Pembinaan dan pengawasan ijin dan non Perizinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran anggaran program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2022 Rp.153.669.920,00 dan belum terealisasi dikarenakan masuk pada Anggaran Kas Triwulan ketiga.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan satu Indikator yaitu Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat. Program tersebut memiliki Indikator Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi. Indikator ini terdiri dari data Jumlah Investor yang berminat promosi pada tahun 2022 dan data Jumlah Investor yang berminat promosi pada tahun 2021.

Presentase peningkatan nilai investasi dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } n - \Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun (n-1)}}{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator yaitu presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi dengan formulasi :

$$\frac{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } n}{\Sigma \text{ Investor tahun } n} \times 100\%$$

Adapun berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya Iklim Investasi antara lain kegiatan Pameran promosi potensi dan peluang investasi, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi dan Pembinaan dan pengawasan ijin dan non perijinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran anggaran Program Promosi Penanaman Modal tahun 2022 Rp. 129.006.518,00 dan belum terealisasi dikarenakan masuk pada Anggaran Kas Tribulan ketiga.

### c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki indikator Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan. Indikator tersebut terdiri Jumlah data Kuisisioner yang Puas dan Jumlah data Kuisisioner yang masuk, dengan formulasi:

$$= \frac{\Sigma \text{Kuisisioner yang puas}}{\Sigma \text{Kuisisioner yang masuk}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022 indikator Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan di targetkan sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 97.98% (Nilai dari semester I atau Tribulan II) dengan capaian sebesar 122.5% . Faktor pendorong Ketercapaian target indikator ini di dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani masyarakat dengan baik sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan.

Dari Gambaran Pencapaian indikator Program Pelayanan Penanaman Modal dapat di lihat pada tabel berikut :

**3.1 Tabel Data Responden Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022**

URAIAN	JUMLAH RESPONDEN		JUMLAH KUISISIONER YANG MASUK
	PUAS	TIDAK PUAS	
JUMLAH SKM SMT I	97	2	99
JUMLAH SKM SMT II	0	0	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Program Pelayanan Penanaman Modal didukung oleh 1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kegiatan Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu

satu pintu yang terdiri dari Data Jumlah Layanan Perizinan dan data Jumlah layanan Non Perizinan dengan Formulasi di bawah ini:

$$= \Sigma \text{ layanan perizinan} + \Sigma \text{ layanan non perizinan}$$

Indikator tersebut di dukung oleh data dibawah ini:

### 3.3 TABEL DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	URAIAN	JUMLAH IZIN	KET
1	Perizinan	694	
2	Non Perizinan	74	
	<b>JUMLAH</b>	<b>768</b>	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Tahun 2022 Semester I atau Tribulan II Indikator Kegiatan Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu ditargetkan 1.500 izin dan terealisasi 768 izin, presentase capaian senilai 51.2%. Ketercapaian tersebut dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat untuk memproses perizinan berusaha melalui OSS.

Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.444.957.252 dan pada tribulan II terealisasi sebesar Rp. 855.078.350 Atau dengan capaian sebesar 34.97 %. Hal ini dikarenakan Serapan Anggaran yang besar terletak pada Belanja Modal Interior Design untuk Mall Pelayanan Publik yang akan di serap pada tribulan IV (Bulan November 2022).

#### d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung dengan 1 kegiatan. Program diukur dengan satu Indikator yaitu Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal dengan Formulasi:

**$\Sigma$  Pelaku usaha yang tertib (dipantau dan diawasi) x 100**  
 **$\Sigma$  Pelaku usaha yang dibina**

Berikut data pelaku usaha yang telah tertib pelaksanaan penanaman modalnya dan telah dibina.

**Tabel 4.1 Pelaku usaha yang tertib tahun 2022**

NO	Tribulan	Pelaku usaha yang tertib	Pelaku usaha yang dibina	Pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha yang diawasi
1	Tribulan I	30	0	15	15
2	Tribulan II	45	76	15	30
Jumlah		75	76	30	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Dari tabel 4.1 diatas jumlah pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal sebesar 75 pelaku usaha. Sedangkan jumlah pelaku usaha yang dibina sebanyak 76. Pada tahun 2022 persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal ditargetkan sebesar 70% dan sampai tribulan II Tahun 2022 terealisasi atau tercapai 71%. Realisasi capaian ini tercapai sebanyak 101%. Capaian ini berdasarkan jumlah pelaku usaha yang tertib (yang dipantau dan diawasi) pelaksanaan penanaman modal sejumlah 75 dibandingkan jumlah pelaku usaha yang dibina sejumlah 76 pelaku usaha. Ketercapaian ini dikarenakan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM dan kesesuaian pelaksanaan usaha dengan dokumen perizinan yang dimiliki.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi dengan formulasi :

**$\Sigma$  pelaku usaha yang dipantau dan diawasi**

Berikut Data Pendukung Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota:

**Tabel 4.2 Pelaku usaha yang dipantau dan diawasi sampai dengan Tribulan II tahun 2022:**

NO	Tribulan	Pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha yang diawasi
1	Tribulan I	15	15
2	Tribulan II	15	30
Jumlah		30	45

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021*

Dari tabel 4.2 diatas, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 50 pelaku usaha yang dipantau dan 60 pelaku usaha yang diawasi dan terealisasi sampai dengan Tribulan II Tahun 2022 jumlah pelaku usaha yang dipantau 30 pelaku usaha dan yang diawasi sebanyak 45 pelaku usaha dengan capaian 68.18%. Adapun faktor pendukung dari hasil pelaksanaan kegiatan banyak pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan sesuai dengan pelaksanaan usahanya.

Besaran anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2022 Rp. 303.698.980,00 dengan realisasi Rp. 34.035.500,00 dengan capaian 13 persen. Realisasi Anggaran tersebut tergolong minim dikarenakan ada Anggaran DAK yang melalui proses pergeseran, sehingga realisasi jadi terhambat. Adanya 2 kegiatan Pembinaan yang dianggarkan pada tribulan III.

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Bidang Informasi Pengembangan dan Pengaduan mengampu Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengolahan data serta memelihara dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal diukur dengan indikator yaitu : *Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan*. Indikator ini terdiri dari Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang di publikasikan tahun ini dan Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang di publikasikan tahun sebelumnya.

Formulasi pengukuran program ini adalah :

$$= \frac{\Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun (n)} - \Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun (n-1)}}{\Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022 Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal dengan Indikator *Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan* dengan Data dan pengukuran peningkatan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di publikasikan

No	Jenis Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tahun 2021 (Tribulan II)	Tahun 2022 (Tribulan II)
1	Social Media (Instagram)	18	15
2	Social Media (Facebook)	37	15
3	Social Media (Website)	10	18
4	Buku Profil	1x (71 eksemplar)	-
5	Banner	1	2
6	Spanduk	3	1

7	Baliho	3	1
8	Sosialisasi	1x (75 peserta)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>52</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Pelaksanaan Penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan dilakukan dari beberapa bentuk :

1. Media Cetak terdiri dari Banner, Spanduk, Baliho dan Buku Profil
2. Media Elektronik terdiri dari Instagram, Facebook dan Website
3. Sosialisasi Mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota.
4. Data Perijinan yang terdiri dari : Ijin Prinsip, Ijin Usaha, Ijin Apotik, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Operasional, Ijin Pemakaian Pemanfaatan Tanah Drainase, Ijin Trayek, Ijin TDUP, Ijin SIUP.

Pada Tahun 2022 dari Target 15% dan pada Tribulan II terealisasi -29,7 %, dengan capaian sebesar -198 %, capaian ini berdasarkan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan tahun 2022 sejumlah 52 jenis data dibandingkan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan tahun 2021 sejumlah 74 jenis data. Pada Tribulan II tahun 2022 belum mencapai target dikarenakan belum terlaksananya sosialisasi di tribulan II, dan akan dilaksanakan pada tribulan III. Pada tribulan II juga belum dilaksanakan publikasi jasa iklan/ reklame yang akan dilaksanakan pada tribulan III.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengampu 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota di ukur dengan Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasikan tahun ini.

Formulasi pengukuran program ini adalah :

*Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang terintegrasikan tahun (n).*

Pada Tahun 2022 target kinerja Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan data yang terintegrasikan sejumlah 500 Izin Reklame dan terealisasi sebanyak 279 Izin Reklame dengan capaian kinerja 55.8%. Definisi data yang terintegrasikan adalah data yang terhubung langsung dengan OPD secara online atau cepat terupdate yaitu Bapenda, DPMPSTSP dan Satpol PP.

**Tabel Jumlah Reklame sampai dengan Bulan Juni 2022**

No	Bulan	Jumlah Reklame
1	Januari	27
2	Februari	51
3	Maret	59
4	April	76
5	Mei	38
6	Juni	28
	<b>TOTAL</b>	<b>279</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 303.698.980 ,- (Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan tercapai sebesar Rp. 34.035.500 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rata-rata ketercapaian kegiatan ini 11 persen. Minimnya serapan anggaran ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran pada pergeseran, sehingga realisasi anggaran jadi terhambat.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tribulan II bulan Juni tahun 2022 DPMPTSP Kota Pasuruan, lebih jelas disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tribulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2021											
2		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18	Urusan Wajib Penanaman Modal				77	73	94.87%			
2	18	2	12	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi				
						90	80	89%			

2	18	2	12	01	01.2	1		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu</b>					90	90	100%			
2	18	2	12	01	01.2	1	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun					3	3	100%			
2	18	2	12	01	01.2	1	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun					7	7	100%			
2	18	2	12	01	01.2	1		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>					80	80	100%			
2	18	2	12	01	01.2	2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya					14	14	100%			
2	18	2	12	01	01.2	2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun					8	8	100%			
2	18	2	12	01	01.2	3		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</b>					90	80	89%			
2	18	2	12	01	01.2	3	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD					4	4	100%			

2	18	2	12	01	01.2	5		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>				100	80	80%				
2	18	2	12	01	01.2	5	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun				4	4	100%				
2	18	2	12	01	01.2	5	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				-	-	-				
2	18	2	12	01	01.2	5	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang diikuti				12	4	33%				
2	18	2	12	01	01.2	6		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>				100	100	100%				
2	18	2	12	01	01.2	6	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7	7	100%				
2	18	2	12	01	01.2	6	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia				6	6	100%				
2	18	2	12	01	01.2	6	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar				12	12	100%				
2	18	2	12	01	01.2	6	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaannya makanan dan minuman				389	383	98%				

2	18	2	12	01	01.2	6	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi				152	152	100%				
2	18	2	12	01	01.2	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah				-	-	0%				
2	18	2	12	01	01.2	7	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				-	-	0%				
2	18	2	12	01	01.2	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran				100	100	100%				
2	18	2	12	01	01.2	8	01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan				478	478	100%				
2	18	2	12	01	01.2	8	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang				12	12	100%				
2	18	2	12	01	01.2	8	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor				3	3	100%				
									Jumlah jasa tenaga honorer non PNS				6	6	100%				
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia				29	29	100%				

2	18	2	12	01	01.2	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	90	90%			
2	18	2	12	01	01.2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia	3,816	3,674	96%			
									Jumlah penggantian minyak pelumas	24	24	100%			
									Jumlah penggantian suku cadang	8	8	100%			
									Jumlah service kendaraan dinas/operasional	8	8	100%			
									Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan	8	8	100%			
2	18	2	12	01	01.2	9	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia	2,340	2,250	96%			
									Jumlah penggantian minyak pelumas	27	27	100%			
									Jumlah penggantian suku cadang	5	5	100%			
									Jumlah service kendaraan dinas/operasional	5	5	100%			
									Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan	5	5	100%			
2	18	2	12	01	01.2	9	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	34	34	100%			

2	18	2	12	01	01.2	9	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia				16	16	100%				
2	18	2	12	01	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor				20	14	70%				
2	18	2	12	01	05.2	01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor				100	122	122%				
2	18	2	12	01	05.2	01	01	Sub kegiatan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal					-	0%				
2	18	2	12	01	05.2	01	02	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah buku data perkembangan investasi				50	1	2%				
2	18	2	12	01	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat				10	12.5	125%				
2	18	2	12	01	03.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi				10	36.89	369%				
2	18	2	12	01	03.2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peserta temu usaha bidang penanaman modal				50	49	98%				
2	18	2	12	01	03.2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi potensi investasi yang diikuti Jumlah potensi investasi yang diikuti				1	1	100%				

2	18	2	12	01	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan					70	95.54	136%			
2	18	2	12	01	04.2	01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu					1,650	1,502	91%			
2	18	2	12	01	04.2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah blanko formulir izin yang tercetak					2,300	124	5%			
									Jumlah rapat tim teknis yang terlaksana						20	4	20%		
									Jumlah sarana dan prasarana pelayanan terpadu satu pintu						1	1	100%		
2	18	2	12	01	04.2	01	02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berita acara survei penelitian lapang yang diterbitkan					750	250	33%			
									Jumlah rapat tim teknis perizinan yang terlaksana						75	60	80%		
2	18	2	12	01	04.2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti					12	2	17%			

									Jumlah peserta peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur DPMPTSP Kota					70	70	100%				
									Jumlah responden yang disurvei					150	150	100%				
									Jumlah terlaksananya pendampingan dan audit ISO 9001:2015					1	1					
2	18	2	12	01	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal					256	202	79%				
2	18	2	12	01	05.2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi					60	172	287%				
2	18	2	12	01	05.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau					30	30					
2	18	2	12	01	05.2	01	02	sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina					256	230	90%				
2	18	2	12	01	05.2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina					30	14					
2	18	2	12	01	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan					15	33.3	222%				

2	18	2	12	01	06.2	01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi				256	512	200%				
2	18	2	12	01	06.2	01	01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun				1	-	0%				
									Jumlah aplikasi yang dipelihara					1	-	0%			
									Jumlah buku profil investasi yang dicetak					50	103	205%			
									Jumlah buku realisasi perizinan yang dicetak					36	-	0%			
									Jumlah peserta sosialisasi mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota					75	75	100%			
									Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan					6	4	75%			
									Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan					40	6	15%			
									Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan					1	500	50000%			
									Jumlah rehab reklame					1	2	198%			
										<b>2022</b>									

2								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	18							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							48	22		
2	18	1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	%				90	50		55.55
2	18	1	2	1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90	%				90	65		55.55
2	18	1	2	1	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen)	3	Dokumen				6	6		200%
2	18	1	2	1	6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)	7	Dokumen				15	7		100%
									Jumlah tenaga operator komputer (Orang)	1	Orang				1	1		100%

2	18	1	2	1	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti (event)	1	Event					1	0	0%
2	18	1	2	2				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	90	Persen					90	90	100%
2	18	1	2	2	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya (bulan)	14	Bulan					14	14	100%
2	18	1	2	2	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	8	Dokumen					8	8	100%
2	18	1	2	3				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu</b>	90	Persen					90	90	100%
2	18	1	2	3	5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD (dokumen)	4	Dokumen					4	4	100%
2	18	1	2	5				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang</b>	90	Persen					80	90	100%



									(Item)								
2	16	1	2	6	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian yang tersedia (bulan)	12	Bulan				12	12	100%
2	16	1	2	6	8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (buku)	12	Buku				60	12	100%
2	16	1	2	6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	68	Kali				125	68	100%
2	18	1	2	7				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	90	Persen				80	90	100%
2	18	1	2	7	5			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit				4	6	100%
2	18	1	2	7	6			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	90	Persen				70	90	100%

2	18	1	2	8			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan (Lembar)	195	Lembar					300	195	100%
2	18	1	2	8	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (Bulan)	12	Bulan					12	12	100%
2	18	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga honorer non PNS, jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor (bulan)	3	Orang					9	3	100%
							<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	90	Persen					90	90	100%
2	18	1	2	9			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas jabatan	6336	Liter					6600	6336	100%

2	18	1	2	9	1			Jumlah penggantian minyak pelumas kendaraan dinas jabatan	49	Kali						40	49	100%
								Jumlah penggantian suku adang kendaraan dinas jabatan	8	Unit						8	8	100%
								Jumlah servise kendaraan dinas jabatan	8	Unit						8	8	100%
								Jumlah surat ijin kendaraan dinas jabatan	8	Unit						8	8	100%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas lapangan	4752	Liter						4752	4752	100%
2	18	1	2	9	2			Jumlah penggantian minyak/pelumas kendaraan dinas/operasional	26	Kali						28	26	100%
								Jumlah penggantian suku cadang kendaraan	5	Unit						5	5	100%



2	18	2	2	1	2			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		Dokumen						1	0	0%
2	18	2	2	1	X			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	1	Potensi						1	0	0%
2	18	2	2	2				Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan		Dokumen						0		0%
2	18	2	2	2	1			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	1	Dokumen						1	0	0%
								<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat</b>	10	Persen						10	0	0%
2	18	3						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10	Persen						10	0	0%

2	18	3	2	1		Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	50	Peserta UMKM					0	0	0%
2	18	3	2	1	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2	Event					1	0	0%
2	18	3	2	1	2	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan</b>	80	Persen					80	85	107%
2	18	4				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu</b>	1500	Izin					1500	384	26%
2	18	4	2	1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu	1	Unit					19	19	1900%
2	18	4	2	1	1		Jumlah Cetak Blanko Formulir	2875	Lembar					0	0	0%



									Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti	12	Pengaduan							12	10	83%
									Jumlah Responden yang Disurvey	150	Responden							200	49	33%
									Jumlah tenaga admin non pns	5	Orang							2	5	100%
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10	Kegiatan Usaha							10	0	0%
2	18	4	2	1	4			<b>Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha Yang Terttib Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	70	Persen							70	71	101%
2	18	5						<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan</b>	50	Pelaku Usaha							180	90	180%

								Kabupaten/Kota	Daerah										
2	18	5	2	1				Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Kegiatan Usaha						90	30	50%
2	18	5	2	1	1			Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasikan dan tersinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100	Pelaku Usaha						256	76	76%
2	18	5	2	1	2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasikan dan Tersinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Kegiatan Usaha						90	60	100%
2	18	5	2	1	3			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang</b>	15	Persen						15	15	100%

									Dipublikasikan											
2	18	6							Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	15	Data					15	15	100%	
2	18	6	2	1					Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	Aplikasi					1	1	100%	
2	18	6	2	1	1					Jumlah Aplikasi yang Dibangun	1	Aplikasi						0	0	0%
										Jumlah Pengadaan Papan Running Text Indoor	0	Unit						0	0	0%
										Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan Perizinan	200	Orang						40	0	0%
										Jumlah Buku Realisasi Perizinan yang Dicitak	36	Buku						3	2	6%
										Jumlah Buku Realisasi Investasi yang	50	Buku						0	0	0%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisa capaian kinerja program Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:

### 1. Nilai Investasi

Realisasi investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp. 252.987.816.400,00 dari target sebesar 245.356.920.000,00 dengan capaian sebesar 103.11 persen. Nilai realisasi investasi Kota Pasuruan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 nilai investasi targetnya sebesar 240.546.000.000,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar 245.952.766.000,00 dengan capaian sebesar 102,25 persen sehingga pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,86 persen.

Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2021 terdiri dari 18 sektor, sektor tertinggi berasal dari bidang perumahan dan ruko yaitu sebesar Rp. 127.423.672.700,00 dan sektor terendah berasal dari bidang usaha peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidaya sarang burung) sebesar Rp.31.000.000,00.

Adapun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung meningkatnya realisasi penanaman modal di Kota Pasuruan yaitu:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, kegiatan penetapan pemeberian fasilitasi/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal.

- Program Promosi Penanaman Modal, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal dan sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota.
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Realisasi investasi sampai dengan Bulan Mei Tribulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 115,100,424,200,00 dari target sebesar 250.264.058.400,00 dengan capaian sebesar 46 persen.

## **2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal**

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kota Pasuruan pada semester I tahun 2022 senilai 85.25 dengan kategori BAIK.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Program pelayanan penanaman modal, kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sietem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan Renja (DPMPTSP) 2022  
Kota Pasuruan

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>INDIKATOR URUSAN</b>												
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	1.48%	1.67%	1.86%	2.05%	2.24%	-47.36%	2.86%	1.48%	1.67%	
2	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>												
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	1.48%	1.67%	1.86%	2.05%	2.24%	-47.36%	2.86%	1.48%	1.67%	
3	<b>INDIKATOR SASARAN</b>												
1	Jumlah Nilai Investasi		IKU	250.264 MRp	255.269 MRp	260.374 MRp	265.582 MRp	265.582 MRp	245.952 MRp	252.987 MRp	250.264 MRp	255.269 MRp	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan penanaman Modal		IKU	81.35	82.44	83.53	84.62	85.71	83.13	84.34	81.35	82.44	
4	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>												

1	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		IKI	80%	80%	80%	80%	80%	92%	90%	80%	80%	
2	Persentase peningkatan jumlah investor		IKI	20%	20%	20%	20%	20%	52%	14%	20%	20%	
3	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat		IKI	10%	10%	10%	10%	10%	10%	13%	10%	10%	
4	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan		IKI	80%	80%	80%	85%	85%	82%	96%	80%	80%	
5	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal		IKI	70%	70%	70%	70%	70%	70%	87%	70%	70%	
6	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan		IKI	15%	15%	15%	15%	15%	16%	33%	15%	15%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan misi, tujuan dan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Permasalahan :

1. Belum adanya pemetaan data potensi;
2. Belum adanya regulasi yang cukup responsif bagi pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi masih belum optimal;
4. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal;
6. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama swasta dengan pelaku usaha (kecil mikro);
7. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik;
8. Minim tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pelayanan perizinan.

▪ Isu Strategis :

1. Penyusunan data potensi investasi yang akurat;
2. Updating regulasi disesuaikan dengan pengembangan iklim;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan akses;
4. Penyusunan data potensi investasi yang akurat dan informative;
5. Sinkronisasi data digital penanaman modal;

6. Peningkatan kerjasama, koordinasi yang solid serta pola kemitraan dengan stakeholder;
7. Optimalisasi media komunikasi dan informasi sebagai sarana sosialisasi perizinan usaha elektronik terintegrasi;
8. Updating media komunikasi dan informasi penanaman modal;
9. Penyusunan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis TI.

Sebagai lembaga daerah, DPMPTSP harapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/ pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel. Membangun sistem ini bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Faktor lain untuk mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah regulasi kapastian hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana fisik, kelayakan fungsi bangunan maupun dukungan teknologi informatika. Hal lain yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan maupun etika.

Visi kota Pasuruan yang ingin menjadikan kota Pasuruan sebagai Kota Madinah menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai aplikator penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dari berbagai sektor diantaranya sektor riil yaitu sektor ekonomi merupakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menumbuh kembangkan realisasi investasi. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik maka dapat mendukung Visi Walikota yang ke 3 yaitu Harmonis Warganya untuk Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang melayani serta Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Mesti Jadi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas pengampu pada Misi Ke-1 (satu) sebagai berikut: “Mempercepat

pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan” dan Misi ke 4 (Empat) Kota Pasuruan Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif merupakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pelayanan dengan teknologi yang terintegrasi. Semakin berkembangnya teknologi mengharuskan kita semua untuk bisa mengadopsi teknologi agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, begitu pula dalam pelaksanaan sistem perijinan diharapkan dengan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dapat mempercepat proses perijinan, memangkas mekanisme perijinan berjenjang, sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan realisasi investasi daerah. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik maka dapat mendukung Misi Walikota yang ke 4 Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam proses penyusunan Renja. RKPD merupakan penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah, dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tujuan dari sistem perencanaan adalah :

1. Meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran *tradeable sectors* yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan
3. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan pelayanan publik, dengan mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan

Implementasi rencana pembangunan tahun 2022 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 050/343/SE/423.204/2022 pada Tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022, Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Surat Edaran Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.
8. Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

Adapun Review terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022, DPMPTSP Kota Pasuruan terdiri dari 6 Program, 13 kegiatan, 34 sub kegiatan, disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel. 2.3  
 Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKP Tahun 2022  
 Kota pasuruan

NO	Rancangan Awal Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,986,815,449	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,986,815,449	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7,986,815,449	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7,986,815,449	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	4,320,886,875	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	4,320,886,875	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	36,638,560	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	36,638,560	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen)	3 Dokumen	8,438,850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen)	3 Dokumen	8,438,850	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)	4 Dokumen	8,199,810	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen	8,199,810
		Kota Pasuruan	Jumlah tenaga operator komputer (Orang)	1 Orang			Kota Pasuruan	Jumlah tenaga operator komputer (Orang)	1 Orang	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti (event)	1 Event	19,999,900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti (event)	1 Event	19,999,900
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	3,401,172,646	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	3,401,172,646
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjanganannya (bulan)	14 Bulan	3,321,926,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjanganannya (bulan)	14 Bulan	3,321,926,200
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	79,246,446	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	79,246,446
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu	90 %	50,283,210	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu	90 %	50,283,210

1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan barang OPD (dokumen)	4 Dokumen	50,283,210	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan barang OPD (dokumen)	4 Dokumen	50,283,210
D	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	<b>90 %</b>	<b>60,946,850</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	<b>90 %</b>	<b>60,946,850</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	0	16,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	32 paket	16,100,000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun (dokumen)	4 Dokumen	3,187,080	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun (dokumen)	4 Dokumen	3,187,080
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah kerohanian yang dilaksanakan (Bulan)	12 Bulan	41,659,770	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah kerohanian yang dilaksanakan (Bulan)	12 Bulan	41,659,770
E	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90 %</b>	<b>215,734,060</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90 %</b>	<b>215,734,060</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Item)	12 Item	3,871,320	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Item)	12 Item	3,871,320
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	10 Item	20,034,940	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	10 Item	20,034,940

			n (Item)					(Item)			
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian yang tersedia (bulan)	12 Bulan	3,520,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian yang tersedia (bulan)	12 Bulan	3,520,800	
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (buku)	12 Buku	8,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (buku)	12 Buku	8,000,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah terselenggara rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	68 kali	180,307,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah terselenggara rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	68 kali	180,307,000	
F	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya a pengadaan barang milik daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>35,173,600</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>35,173,600</b>	
1	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35,173,600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	35,173,600	
G	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya a jasa penunjang layanan perkantoran</b>	<b>90 %</b>	<b>239,183,566</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	<b>90 %</b>	<b>239,183,566</b>	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah materi yang dibutuhkan (Lembar)	195 Lembar	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah materi yang dibutuhkan (Lembar)	195 Lembar	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (Bulan)	12 Bulan	115,079,816	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (Bulan)	12 Bulan	115,079,816
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah jasa tenaga honorer non PNS (orang)	3 Orang	121,103,750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah jasa tenaga honorer non PNS (orang)	3 Orang	121,103,750
		Kota Pasuruan	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor (bulan)	6 Bulan			Kota Pasuruan	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor (bulan)	6 Bulan	
		Kota Pasuruan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia (item)	29 Item			Kota Pasuruan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia (item)	29 Item	
H	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>90 %</b>	<b>281,754,383</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>90%</b>	<b>281,754,383</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas jabatan	6336 liter	103,125,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas jabatan	6336 liter	103,125,400
		Kota Pasuruan	Jumlah penggantian minyak pelumas kendaraan dinas	49 kali			Kota Pasuruan	Jumlah penggantian minyak pelumas kendaraan dinas jabatan	49 kali	

			jabatan								
		Kota Pasuruan	Jumlah penggantian suku adang kendaraan dinas jabatan	8 unit			Kota Pasuruan	Jumlah penggantian suku adang kendaraan dinas jabatan	8 unit		
		<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah service kendaraan dinas jabatan</b>	8 unit			<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah service kendaraan dinas jabatan</b>	8 unit		
		Kota Pasuruan	Jumlah surat ijin kendaraan dinas jabatan	8 unit			Kota Pasuruan	Jumlah surat ijin kendaraan dinas jabatan	8 unit		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas lapangan	4752 liter	77,766,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas lapangan	4752 liter	77,766,000	
		Kota Pasuruan	Jumlah penggantian minyak/pelumas kendaraan dinas/operasional	26 kali			Kota Pasuruan	Jumlah penggantian minyak/pelumas kendaraan dinas/operasional	26 kali		
		Kota Pasuruan	Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas/lapangan	5 unit			Kota Pasuruan	Jumlah penggantian suku cadang kendaraan dinas/lapangan	5 unit		
		Kota Pasuruan	Jumlah service kendaraan dinas lapangan	5 unit			Kota Pasuruan	Jumlah service kendaraan dinas lapangan	5 unit		

		Kota Pasuruan	Jumlah surat ijin kendaraan dinas lapangan	5 unit			Kota Pasuruan	Jumlah surat ijin kendaraan dinas lapangan	5 unit		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peraltan kantor yang terpelihara	34 unit	35,863,608	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peraltan kantor yang terpelihara	34 unit	35,863,608	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia	22 item	64,999,375	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia	22 item	64,999,375	
II	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>20%</b>	<b>153,669,920</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>20%</b>	<b>153,669,920</b>	
A	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>155 Investor</b>	<b>88,669,950</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>155 Investor</b>	<b>88,669,950</b>	
1	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	50 Buku	79,717,070	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	50 Buku	79,717,070	
2	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	8,952,880	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	8,952,880	
B	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	<b>1 Potensi</b>	<b>64,999,970</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	<b>1 Potensi</b>	<b>64,999,970</b>	
1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	dokumen	-	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	dokumen	-	

2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	1 Dokumen	64,999,970	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	1 Dokumen	64,999,970
		Kota Pasuruan	Jumlah Buku Peluang Investasi Kota Pasuruan	Dokumen			Kota Pasuruan	Jumlah Buku Peluang Investasi Kota Pasuruan	Dokumen	
		Kota Pasuruan	Jumlah Video Profil Potensi Investasi Kota Pasuruan	Video Profil			Kota Pasuruan	Jumlah Video Profil Potensi Investasi Kota Pasuruan	Video Profil	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	10 %	129,006,518	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	10 %	129,006,518
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10%	129,006,518	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10%	129,006,518
1	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	50 Peserta UMKM	52,297,080	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal		52,297,080
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Event	76,709,438	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal		76,709,438
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan	80 %	2,578,077,696	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan		2,578,077,696

			perizinan				perizinan			
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Luar Kota dan Luar Propinsi	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	1500 Izin	2,578,077,696	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Luar Kota dan Luar Propinsi	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu		2,578,077,696
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu		2,415,712,226	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu	1 Kali	2,415,712,226
		Kota Pasuruan	Jumlah Cetak Blanko Formulir Izin	2875 Lembar			Kota Pasuruan	Jumlah Cetak Blanko Formulir Izin	2875 Lembar	
		Kota Pasuruan	Jumlah Cetak Kartu Izin	2875 Lembar			Kota Pasuruan	Jumlah Cetak Kartu Izin	2875 Lembar	
		Kota Pasuruan	Jumlag Rapat Tim Teknis	24 kali			Kota Pasuruan	Jumlag Rapat Tim Teknis	24 kali	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Survey Monitoring dan Evaluasi Perizinan	787 hari	42,365,670	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Survey Monitoring dan Evaluasi Perizinan	787 hari	42,365,670
		Kota Pasuruan	Jumlah Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan	79 kali			Kota Pasuruan	Jumlah Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan	79 kali	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Pasuruan	Jumlah Terlaksananya Pendampingan dan Audit ISO 9001:2015	0	119,999,800	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Pasuruan	Jumlah Terlaksananya Pendampingan dan Audit ISO 9001:2015	0	119,999,800

		Kota Pasuruan	Jumlah Souvenir yang Dibagikan	200 Buah			Kota Pasuruan	Jumlah Souvenir yang Dibagikan	200 Buah		
		Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Peningkatan Wawasan dan Kompetensi Aparatur DPMPPTSP Kota Pasuruan	50 Peserta			Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Peningkatan Wawasan dan Kompetensi Aparatur DPMPPTSP Kota Pasuruan	50 Peserta		
		Kota Pasuruan	Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti	12 Pengaduan			Kota Pasuruan	Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti	12 Pengaduan		
		Kota Pasuruan	Jumlah Responden yang Disurvey	150 responden			Kota Pasuruan	Jumlah Responden yang Disurvey	150 responden		
		Kota Pasuruan	Jumlah tenaga admin non pns	0 Orang			Kota Pasuruan	Jumlah tenaga admin non pns	0 Orang		
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	-	
V	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Pasuruan	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib	70 %	461,475,470	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Pasuruan	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib	70 %	461,475,470	

			Pelaksanaan Penanaman Modal				Pelaksanaan Penanaman Modal			
A	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	50 pelaku usaha	461,475,470	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	50 pelaku usaha	461,475,470
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasikan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha.	44,863,110	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasikan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha.	44,863,110
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasikan dan tersinkronisasikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 Pelaku Usaha	348,054,050	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasikan dan tersinkronisasikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 Pelaku Usaha	348,054,050
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasikan dan Tersinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	68,558,310	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Terkoordinasikan dan Tersinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	68,558,310
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	15 %	343,698,970	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	15 %	343,698,970

			an					an			
A	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	15 Data	343,698,970	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	15 Data	343,698,970	
1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	343,698,970	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	343,698,970	
		Kota Pasuruan	Jumlah Aplikasi yang Dibangun	1 Aplikasi			Kota Pasuruan	Jumlah Aplikasi yang Dibangun	1 Aplikasi		
		Kota Pasuruan	Jumlah Pengadaan Papan Running Text Indoor	0 Unit			Kota Pasuruan	Jumlah Pengadaan Papan Running Text Indoor	Unit		
		Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan Perizinan	200 Orang			Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan Perizinan	200 Orang		
		Kota Pasuruan	Jumlah Buku Realisasi Perizinan yang Dicitak	36 Buku			Kota Pasuruan	Jumlah Buku Realisasi Perizinan yang Dicitak	36 Buku		

		Kota Pasuruan	Jumlah Buku Realisasi Investasi yang Dicitak	50 Buku			Kota Pasuruan	Jumlah Buku Realisasi Investasi yang Dicitak	50 Buku		
		Kota Pasuruan	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Pengaduan Melalui Media Cetak Elektronik	5 baliho			Kota Pasuruan	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Pengaduan Melalui Media Cetak Elektronik	5 baliho		
		Kota Pasuruan		11 Spanduk			Kota Pasuruan		13 Spanduk		
		Kota Pasuruan		40 Roll			Kota Pasuruan		40 Roll		
		Kota Pasuruan		Banner			Kota Pasuruan		Banner		
		Kota Pasuruan		1000 Leaflet			Kota Pasuruan		1000 Leaflet		
		Kota Pasuruan	Jumlah tenaga admin non pns	0 Orang			Kota Pasuruan	Jumlah tenaga admin non pns	4 Orang		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan sampai kota, para stake holder dan masyarakat melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan untuk diakomodir dalam kegiatan OPD yang membidangi masing – masing kegiatan. Dengan Musrenbang diharapkan sasaran, lokasi kegiatan dan anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk usulan program dan kegiatan Perubahan dari para pemangku kepentingan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2022 tidak ada atau nihil, hal ini menunjukkan tidak adanya tuntutan masyarakat pada DPMPTSP untuk meningkatkan peranan sosialisasi dan fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi, namun ini menjadi inisiatif DPMPTSP untuk meningkatkan strategi promosi dan informasi yang merupakan media yang penting untuk menawarkan potensi investasi daerah, sehingga masyarakat paham terhadap juknis mekanisme Perizinan yang selanjutnya tentu akan meningkatkan minat investasi.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Pasuruan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB III

### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana program dan kegiatan ditahun 2022 pada DPMPTSP Kota Pasuruan yang diusulkan pendanaanya ialah melalui beberapa sumber dana diantaranya, sumber dana APBN dan APBD Kota yang telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Pasuruan, melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*).

Adapun Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 maju indikatif tahun 2023 pada DPMPTSP Kota Pasuruan dapat di lihat pada tabel 3.1. :

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Perubahan Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Perubahan						
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,645,304,889	7,986,815,449	DAU			9,455,005,014	
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan				7,645,304,889	7,986,815,449	DAU			9,455,005,014	
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90 %	90 %	4,221,497,999	4,320,886,875	DAU		90%	4,964,474,267

2	18	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	90 %	19,645,060	36,638,560	DAU	90%	27,277,997
2	18	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (dokumen)	Kota Pasuruan	3 Dokumen	3 Dokumen	6,445,350	8,438,850	DAU	4 Dokumen	10,229,033
2	18	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)	Kota Pasuruan	7 Dokumen	7 Dokumen	8,199,810	8,199,810	DAU	4 Laporan	17,048,964
							Jumlah tenaga operator komputer (Orang)	Kota Pasuruan	1 Orang	1 Orang					
2	18	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti (event)	Kota Pasuruan	1 Event	1 Event	4,999,900	19,999,900	DAU	1 Laporan	-
2	18	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	90 %	3,392,491,270	3,401,172,646	DAU	90 %	3,423,152,121

2	18	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya (bulan)	Kota Pasuruan	14 Bulan	14 Bulan	3,317,726,200	3,321,926,200	DAU		40 Orang	3,321,926,200
2	18	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (dokumen)	Kota Pasuruan	8 Dokumen	8 Dokumen	74,765,070	79,246,446	DAU		8 Laporan	101,225,921
2	18	1	2	3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>50,283,210</b>	<b>50,283,210</b>	<b>DAU</b>		<b>90%</b>	<b>91,065,749</b>
2	18	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD (dokumen)	Kota Pasuruan	4 Dokumen	4 Dokumen	50,283,210	50,283,210	DAU		4 Laporan	91,065,749
2	18	1	2	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkatkan kompetensinya</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>44,846,850</b>	<b>60,946,850</b>	<b>DAU</b>		<b>90%</b>	<b>378,861,651</b>
2	18	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	Kota Pasuruan	0	32 paket	0	16,100,000	DAU		32 Paket	16,100,000
2	18	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun (dokumen)	Kota Pasuruan	4 Dokumen	4 Dokumen	3,187,080	3,187,080	DAU		5 Dokumen	7,139,780
2	18	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan yang diikuti	Kota Pasuruan	1 Paket	1 Paket	-	-	DAU		1 Paket	269,078,096

2	18	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang dilaksanakan (Bulan)	Kota Pasuruan	12 Bulan	12 Bulan	41,659,770	41,659,770	DAU	40 Orang	86,543,775
2	18	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	90 %	185,301,060	215,734,060	DAU	90 %	254,875,758
2	16	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Item)	Kota Pasuruan	12 Item	12 Item	3,871,320	3,871,320	DAU	8 Paket	1,482,468
2	16	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan (Item)	Kota Pasuruan	10 Item	10 Item	20,034,940	20,034,940	DAU	7 Paket	24,512,574
2	16	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian yang tersedia (bulan)	Kota Pasuruan	12 Bulan	12 Bulan	3,520,800	3,520,800	DAU	12 Dokumen	6,963,818
2	16	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (buku)	Kota Pasuruan	12 Buku	12 Buku	8,000,000	8,000,000	DAU	4 Laporan	20,539,200
2	16	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	Kota Pasuruan	68 kali	68 kali	149,874,000	180,307,000	DAU	125 Laporan	201,377,698
2	18	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan	90 %	90 %	35,173,600	35,173,600	DAU	90 %	26,824,090

2	18	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pasuruan					DAU		20 Unit	-
2	18	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	6 Unit	7 Unit	35,173,600	35,173,600	DAU		4 Unit	26,824,090
2	18	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	90 %	239,183,566	239,183,566	DAU		90 %	438,737,537
2	18	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan (Lembar)	Kota Pasuruan	195 Lembar	195 Lembar	3,000,000	3,000,000	DAU		4 Laporan	4,158,000
2	18	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (Bulan)	Kota Pasuruan	12 Bulan	12 Bulan	115,079,816	115,079,816	DAU		12 Laporan	192,124,800
2	18	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga honorer non PNS (orang)	Kota Pasuruan	3 Orang	3 Orang	121,103,750	121,103,750	DAU		12 Laporan	242,454,737
							Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor (bulan)	Kota Pasuruan	6 Bulan	6 Bulan			DAU			
							Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia (item)	Kota Pasuruan	29 Item	29 Item			DAU			

2	18	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan	90 %	90%	254,573,383	281,754,383	DAU		90%	323,679,364
2	18	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas jabatan	Kota Pasuruan	6336 liter	6336 liter	86,717,400	103,125,400	DAU		8 Unit	192,124,800
							Jumlah penggantian minyak pelumas kendaraan dinas jabatan	Kota Pasuruan	49 kali	49 kali						
							Jumlah penggantian suku adang kendaraan dinas jabatan	Kota Pasuruan	8 unit	8 unit						
							<b>Jumlah servise kendaraan dinas jabatan</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	8 unit	8 unit			<b>DAU</b>			
							Jumlah surat ijin kendaraan dinas jabatan	Kota Pasuruan	8 unit	8 unit			DAU			
2	18	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia kendaraan dinas lapangan	Kota Pasuruan	4752 liter	4752 liter	66,993,000	77,766,000			5 Unit	81,155,606
							Jumlah penggantian minyak/pelumas kendaraan dinas/operasional	Kota Pasuruan	26 kali	26 kali						



2	18	2	2	1	2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	Kota Pasuruan	50 Buku	50 Buku	79,717,070	79,717,070	DAU		25,477,936
2	18	2	2	1	X	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Pasuruan	Dokumen	Dokumen	8,952,880	8,952,880	DAU		78,219,000
2	18	2	2	2		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>1 Potensi</b>	<b>1 Potensi</b>	<b>64,999,970</b>	<b>64,999,970</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>220,840,000</b>
2	18	2	2	2	1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	dokumen	dokumen	-	-	DAU	0	-
2	18	2	2	2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	64,999,970	64,999,970	DAU	0	220,840,000
							Jumlah Buku Peluang Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Dokumen	Dokumen			DAU	0	
							Jumlah Video Profil Potensi Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Video Profil	Video Profil			DAU	0	

2	18	3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	Kota Pasuruan	10 %	10 %	129,006,518	129,006,518	DAU		10 %	473,969,758
2	18	3	2	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	Kota Pasuruan	10%	10%	129,006,518	129,006,518	DAU		50 Investor	473,969,758
2	18	3	2	1	1	Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	50 Peserta UMKM		52,297,080	52,297,080	DAU		0	125,991,858
2	18	3	2	1	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Pasuruan	2 Event		76,709,438	76,709,438	DAU		4 Dokumen	347,977,900
2	18	4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	Kota Pasuruan	80 %		2,444,957,252	2,578,077,696	DAU			2,957,830,683
2	18	4	2	1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	Luar Kota dan Luar Propinsi	1500 Izin		2,444,957,252	2,578,077,696	DAU		1500 Izin	2,957,830,683
2	18	4	2	1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu	Kota Pasuruan		1 Kali	2,213,590,382	2,415,712,226	DAU		300 Pelaku Usaha	2,194,909,016

							Jumlah Cetak Blanko Formulir Izin	Kota Pasuruan	2875 Lembar	2875 Lembar						DAU				
							Jumlah Cetak Kartu Izin	Kota Pasuruan	2875 Lembar	2875 Lembar							DAU			
							Jumlag Rapat Tim Teknis	Kota Pasuruan	24 kali	24 kali										
2	18	4	2	1	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Survey Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Kota Pasuruan	787 hari	787 hari	42,365,670	42,365,670						300 Kegiatan usaha	79,592,526	
							Jumlah Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Kota Pasuruan	79 kali	79 kali										
2	18	4	2	1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Terlaksananya Pendampingan dan Audit ISO 9001:2015	Kota Pasuruan	0	0	119,999,800	119,999,800	DAU				50 Orang	313,634,141		



2	18	5	2	1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kota Pasuruan	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	392,474,220	461,475,470	DAU	50 pelaku usaha	420,494,400
2	18	5	2	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasikan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha.	60 Kegiatan Usaha.	44,863,110	44,863,110	DAU	60 Kegiatan Usaha.	35,900,200
2	18	5	2	1	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasikan dan tersinkronisasikan pelaksanaan penanaman modal	Kota Pasuruan	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	279,052,800	348,054,050	DAU	100 Pelaku Usaha	348,054,200
2	18	5	2	1	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasikan dan Tersinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	68,558,310	68,558,310	DAU	60 Kegiatan Usaha	36,540,000
2	18	6				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	Kota Pasuruan	15 %	15 %	303,698,980	343,698,970	DAU	15 %	313,698,970

2	18	6	2	1		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kota Pasuruan	15 Data	15 Data	303,698,980	343,698,970	DAU		15 Data	313,698,970
2	18	6	2	1	1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara	Kota Pasuruan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	303,698,980	343,698,970	DAU		3 Dokumen	313,698,970
							Jumlah Aplikasi yang Dibangun	Kota Pasuruan	1 Aplikasi	1 Aplikasi				DAU		
							Jumlah Pengadaan Papan Running Text Indoor	Kota Pasuruan	0 Unit	Unit				DAU		
							Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan Perizinan	Kota Pasuruan	200 Orang	200 Orang				DAU		
							Jumlah Buku Realisasi Perizinan yang Dicitak	Kota Pasuruan	36 Buku	36 Buku				DAU		

							Jumlah Buku Realisasi Investasi yang Dicitak	Kota Pasuruan	50 Buku	50 Buku					DAU			
							Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Pengaduan Melalui Media Cetak Elketronik	Kota Pasuruan	5 baliho	5 baliho					DAU			
								Kota Pasuruan	11 Spanduk	13 Spanduk					DAU			
								Kota Pasuruan	40 Roll	40 Roll					DAU			
								Kota Pasuruan	Banner	Banner					DAU			
								Kota Pasuruan	1000 Leaflet	1000 Leaflet					DAU			
							Jumlah tenaga admin non pns	Kota Pasuruan	0 Orang	4 Orang					DAU			

## PENUTUP

BAB  
V**5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

1. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Bahwa didalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) tahun 2022 telah mengacu pada ketentuan “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang direncanakan mengacu pada RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD.
4. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program / kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas dan tema

pembangunan Kota Pasuruan tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi Didukung Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Potensi Lokal”, sehingga diharapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah dirancang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

## 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) kota Pasuruan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD 2016-2021 dengan sebaik baiknya;
2. OPD kota Pasuruan, berkewajiban menyusun rencana strategis ( Renstra ) yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD kota Pasuruan 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD
3. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
4. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
5. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
6. Pembinaan terhadap pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.3 Rencana tindak lanjut

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pasuruan sebagai lembaga PTSP Kota Pasuruan diberi kewenangan untuk menangani 10 sektor / 51 jenis Perizinan, sehingga ke depan akan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana program, pelayanan publik, alur proses pelayanan Perizinan yang efisien dengan biaya rendah serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan disusunnya rencana kerja 2022 ini diharapkan pengembangan penanaman modal dan Perizinan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005